

PERUBAHAN, KEBUDAYAAN, DAN AGAMA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI KEKUASAAN

Wa Ode Sifatu

Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

ABSTRAK

Perubahan, kebudayaan, dan agama, merupakan tema yang menarik untuk dikaji secara antropologis mengingat masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan masyarakat majemuk dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana perubahan, kebudayaan, dan agama menjadi sumber konflik dalam kehidupan berasyarakat di Indonesia. Tulisan ini menelusuri kedudukan perubahan, kekuasaan, dan agama melalui penelusuran kepustakaan untuk memahami nilai analitis yang bersifat heuristik dalam konteks antropologi kekuasaan.

Sejak keberadaan manusia di muka bumi, manusia selalu bertanya tentang asal-usul keberadaannya, kehidupannya, dan keberadaannya nanti setelah kematian. Manusia berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui berbagai cara di antaranya melalui agama dan ilmu pengetahuan. Namun agama menyediakan surga dan neraka, serta ilmu pengetahuan melahirkan berbagai kemudahan dan efek samping yang menimbulkan kerugian bagi manusia sehingga manusia selalu diselimuti oleh perasaan takut. Dalam kondisi seperti itu, banyak pihak yang karena kekuasaannya mengklaim kelompoknya sebagai ahli surga sedangkan kelompok lain adalah ahli neraka.

Kata Kunci: Perubahan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, agama

1. Pendahuluan

Sejak keberadaan manusia di muka bumi, manusia selalu bertanya tentang asal-usul keberadaannya, kehidupannya, dan keberadaannya nanti setelah kematian. Manusia berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui berbagai cara di antaranya melalui agama dan ilmu pengetahuan. Namun hingga sekarang, berbagai pertanyaan tersebut belum dapat menemukan jawaban yang memadai, karena agama menyediakan surga dan neraka, serta ilmu pengetahuan melahirkan berbagai kemudahan dan efek samping yang menimbulkan kerugian bagi manusia sehingga manusia selalu diselimuti oleh perasaan takut. Jawaban yang paling baik bagi manusia adalah kesadaran manusia akan keberadaannya sebagai bagian dari alam semesta (Cassirer, 1987), dan manusia berinteraksi dengan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi agama dan ilmu pengetahuan.

2. Pembahasan

Perubahan, dalam hal ini dibaca sebagai kesempatan sosial, yakni kejadian-kejadian yang tak terduga-duga, pada dasarnya dapat terjadi melalui dialektika antara agen, individual atau sosial, dan struktur sosial, pola-pola interaksi dengan konstren terhadap tindakan dalam fenomena sosial makro, di berbagai tingkat, mikro-mezo-makro. Melalui dialektika ini, isu kekuasaan, sebagai konsekuensi interaksi antara agen, struktur sosial, dan kesempatan sosial, berkembang di dua tataran, yang bersifat keagenan (*agentic*), bentuk-bentuk kekuasaan yang setengah sistemik dan setengah keagenan, yaitu kemampuan agen untuk membentuk kondisi sosial ke suatu arah, dan objektif, yang dianggap 'benar' (Sibeon, 2004) Isu kekuasaan yang berkembang dari perbedaan-perbedaan sosial (*social distinctions*) dan proses-proses perbedaan dalam hal ini

selalu bersinergi dengan kehadiran resistensi, sebagai cara-cara dominasi atau perlawanan satu pihak terhadap pihak lain yang bisa hadir dalam tingkat wacana, bahasa, dan ritual, dan konflik, yakni dualisme dan klaim-klaim atas kekuasaan. (Saifuddin, 2008) Model kekuasaan di tataran keagenan dapat terlihat dari misalnya dari pemikiran Max Weber yang merumuskan kekuasaan sebagai kemungkinan seorang aktor atau sekelompok aktor dalam suatu relasi sosial mengambil posisi untuk mewujudkan ambisinya terlepas dari resistensi yang dihadapinya; dengan demikian berpotensi untuk melahirkan konflik. Sementara, model kekuasaan di tataran objektif dapat terlihat misalnya dari pemikiran Michel Foucault yang merumuskan kekuasaan setidak-tidaknya dalam tiga ruang lingkup. Pertama, kekuasaan secara umum bersifat spontan dan tidak perhitungan, berada di mana-mana, bisa terlihat di tingkat agen maupun struktur sosial. Kedua, kekuasaan yang bersifat terstruktur yang misalnya dilakukan oleh negara, mencakup kebijakan atau tindakan atau mekanisme peraturan dan kontrol maupun sosialisasi atau internalisasi. Ketiga, kekuasaan adalah wacana di mana proses konstruksi dan rekonstruksi pemaknaan adalah praktek diskursif untuk mengidentifikasi masalah, intervensi, respons, dan solusi. (Sibeon, 2004; Rabinow, 1986, Alan, 2005) Sehubungan dengan saling hubungan antara agen, struktur sosial, dan perubahan, perspektif tentang kekuasaan yang bersifat sistemik dan relasional dapat merupakan gabungan antara kekuasaan yang bersifat keagenan dan objektif. Kekuasaan keagenan dapat berangkat dari peranan atau posisi agen maupun interaksi sosial di tingkat mikro atau mezo dan dari wacana, lembaga sosial, dan sistem sosial atau jejaringan sosial.

Kedua, berangkat dari landasan pemikiran tentang perubahan dan kekuasaan melalui kesalinghubungan antara agen dan struktur

sosial di atas, maka langkah berikutnya untuk melihat bagaimana kondisi tersebut direpresentasikan dalam kebudayaan secara luas adalah dengan memperhatikan perkembangan perspektif konsepsi kebudayaan itu sendiri. Dalam membangun jembatan antara aspek-aspek mikro, interaksi di tingkat agen, dan makro, pranata-pranata sosial masyarakat, Peter Berger merumuskan dialektika antara objektifikasi atau institusionalisasi, tujuan dan tindakan aktor mengkonstruksikan kondisi sosial (*externalization*), dan internalisasi, keadaan di mana kondisi sosial yang telah secara mental diserap diappropriasikan kembali pada aktor (*internalization*). (Sibeon, 2004) Melalui pemikiran Berger dan Foucault di atas, yang menunjukkan hubungan antara aktor-struktur-mikro-makro ini, maka sorotan terhadap konsepsi kebudayaan dapat dilakukan. Salah satu paradigma dalam antropologi yang secara ontologis dan epistemologis menyoroti konsepsi kebudayaan adalah *self-other*, dapat dibaca sebagai wacana yang memberikan kesadaran mengenai jejaringan kekuasaan yang terjadi di berbagai aspek, baik aktor dengan aktor, aktor sosial dengan aktor sosial, aktor atau aktor sosial dan negara maupun antara aktor dan struktur sosial. Dalam hal ini, pemikiran Pierre Bordieu dapat diterapkan untuk melihat berbagai modal masyarakat, sosial-budaya-ekonomi-politik, yang membangun habitus masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah kontradiksi, kesalahpahaman, ketidakmampuan mengenali, strategi, ambisi, dan berbagai bentukan kebudayaan. (Fox, 1991) Telaah kebudayaan dalam perspektif masa kini yang lebih memperhitungkan wacana dan jejaringan dengan demikian dapat mengambil model konsepsi kebudayaan Michael Fischer yang menempatkannya dalam *the jeweller's eye view*, dialektika antara sudut pandang lokal-global, para antropolog yang memperhitungkan perubahan-perubahannya dalam perspektif historis. Dengan

menyoroti konsepsi kebudayaan dalam perspektif historis yang sangat luas sebagai yang bersifat relasional, kompleks, jejaringan antara bagian, simbolik, dalam hubungannya dengan sistem maupun kekuasaan, dan multi, dalam hubungannya dengan globalisasi, maka hubungan aspek-aspek aktor-struktur-mikro-makro dapat didukung oleh adanya perbedaan-perbedaan kepentingan, akses, kekuasaan, kebutuhan, keinginan, dan perspektif filosofis.

Ketiga, di tengah-tengah perubahan dan kekuasaan yang membayangi relasi aktor-struktur-mikro-makro dalam kebudayaan akan menempatkan sorotan terhadap pranata keagamaan dapat konstelasi kepentingan dunia masa kini. Untuk itu penelusuran berbagai pemikiran sehubungan dengan kondisi antropomorfisme (*anthropomorphism*), yaitu unsur kemanusiaan yang dihadirkan untuk menggantikan yang bersifat supernatural. (Crapo, 2002) Penelusuran beberapa pemikiran tentang pranata keagamaan, di antaranya Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber, dan Clifford Geertz, dapat diletakkan melalui kerangka perubahan dan kekuasaan yang melibatkan aktor-struktur-mikro-makro dalam perspektif kebudayaan.

Contoh etnografi yang menggunakan paradigma kekuasaan adalah *Power Plays: Wayang Golek Puppet Theater of West Java* (Weintraub, 2004). Penelitian dilakukan Andrew N. Weintraub di Bandung dan Jelegong (berlokasi sekitar dua puluh kilometer di Selatan Bandung) selama enam belas bulan (1994-1995) dan dua bulan di musim kemarau (1999 dan 2001). Weintraub membahas mengenai wayang golek dengan subjek penelitiannya adalah dalang terkenal Asep Sunarya yang bertempat tinggal di Jelegong. Berbeda dengan tulisan Scott yang jelas-jelas memberikan pendapat pribadinya, Weintraub tidak terlalu kentara menyatakan keberpihakannya kepada dalang Asep Sunarya yang melakukan

terobosan-terobosan pada wayang golek yang ditentang oleh para tradisionalis. Meskipun tidak tampak secara jelas mana pihak yang berkuasa dan mana pihak yang ditekan, secara implisit dapat dikatakan kalau dalang Asep Sunarya menawarkan pertunjukan wayang golek yang mengakomodir interaksi dengan penonton, menerima titipan-titipan pesan (pemilik hajatan, agen pemerintah, atau sponsor) yang dimasukkan ke dalam percakapan di dalam cerita, dan melakukan kritik sosial. Ketika ekonomi Indonesia mengalami krisis moneter, dalang Asep Sunarya menampilkan wayang golek melalui kaset dan VCD. Hal-hal yang dilakukan dalang Asep Sunarya ini dianggap oleh para tradisionalis sebagai suatu pengkhianatan terhadap kesakralan wayang golek, dimana ada pakem (terkait dengan cerita dan karakter yang merupakan prinsip artistic) dan tetekon (terkait dengan pelaksanaan pertunjukan) yang baku. Pendekatan *critical ethnography* Weintraub tersebar di buku tersebut dalam bentuk argumennya mengenai produksi makna di dalam wayang golek yang berpotongan dengan perjuangan sosial atas kekuasaan dan otoritas. Dua hal yang menjadi sorotan adalah kontradiksi antara tema dan ketegangan akan hiburan populer (dipahami sebagai “hanya” pelarian dan tidak ditanggapi secara serius) dan politik negara (seringkali dalam bentuk kemewahan bentuk kekuasaan dan ditanggapi secara serius). Dalam praktek kebudayaan, wayang golek merupakan upaya presentasi budaya yang menjernihkan proses sosial membangun identitas (regional dan subregional), kewarganegaraan (di dalam Orde Baru dan pasca Orde Baru di Indonesia), dan komunitas (desa, lingkungan bertetangga, dan keluarga) pada suatu waktu dan tempat tertentu (halaman 233).

3. Kesimpulan

Sejak keberadaan manusia di muka bumi, manusia selalu bertanya tentang asal-usul keberadaannya, kehidupannya,

dan keberadaannya nanti setelah kematian. Manusia berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui berbagai cara di antaranya melalui agama dan ilmu pengetahuan. Namun agama menyediakan surga dan neraka, serta ilmu pengetahuan melahirkan berbagai kemudahan dan efek samping yang menimbulkan kerugian bagi manusia sehingga manusia selalu diselimuti oleh perasaan takut. Dalam kondisi seperti itu, banyak pihak yang karena kekuasaannya mengklaim kelompoknya sebagai ahli surga sedangkan kelompok lain adalah ahli neraka.

Rujukan

- Alan, Kenneth. 2005. *Explorations in Classical Sociological Theory. Seeing the Social World*. Thousand Oaks: Pine Forge Press
- Crapo, Richley H. 2002 *Cultural Anthropology: Understanding Ourselves & Others*. Boston: McGraw Hill
- Fischer, Michael M.J. 2007. Culture & Cultural Analysis as Experimental Systems in Culture and Cultural Analysis as Experimental Systems in *Cultural Anthropology*, Feb, 22,1. Academic Research Library
- Fox, Richard G. ed. 1991 *Recapturing Anthropology: Working in the Present*. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press
- Rabinow, Paul. 1986 Representations are Sosial Facts: Modernity and Post-modernity in Anthropology in Clifford James & George E. Marcus, eds. *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley: University of California Press
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.

Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. Memahami Pendidikan Melalui Kebudayaan Peristiwa Berulang Ekspresi Suatu Pola. Jakarta: *Kompas*, Sabtu 23 Juni 2005, hlm 14.

Sibeon, Roger. 2004. *Rethinking Social Theory*. London: Sage Publications.

Weintraub, Andrew N. 2004. *Power Plays: Wayang Golek Puppet Theater of West Java*. New York: The Guilford Press